

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Konflik lingkungan hidup menjadi isu penting di zaman ini, di mana eksploitasi sumber daya alam sering kali bertentangan dengan upaya keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah hal terpenting dalam kehidupan setiap makhluk hidup di dunia ini termasuk juga pada manusia. Lingkungan hidup secara umum mempunyai arti meliputi dunia, alam semesta, habitat, serta ekosistem. Dalam lingkungan hidup semua yang termasuk di dalamnya melakukan interaksi satu sama lain. Keberadaan makhluk hidup sangat bergantung pada lingkungan hidup.²

Meningkatnya populasi serta kebutuhan atas sumber daya alam adalah salah satu faktor konflik lingkungan yang terjadi karena adanya persaingan untuk mendapatkan sumber daya alam yang memadai. Persaingan inilah yang membuat semakin menipisnya kekayaan sumber daya alam. Hal itu telah memicu eksploitasi sumber daya alam dalam jumlah yang besar.³ Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dijelaskan pula tentang bagaimana penggunaan sumber daya alam harus sesuai porsi, dan sesuai fungsi lingkungan hidup. Sebagai kewajiban, dalam peraturan tersebut rencana pembangunan atau pengelolaan haruslah seimbang dengan pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam diperlukan guna menjaga kekayaan sumber daya alam dan juga keberlangsungan pembangunan.⁴

Praktik penambangan adalah bentuk praktik eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan yang dimanfaatkan atas nama kepentingan industri dan ekonomi. Ekonomi kapitalistik memandang alam sebagai alat akumulasi modal untuk menjaga kestabilan perekonomian. Salah satu kegunaan tambang bagi daerah yang berlimpah sumber daya alamnya adalah sebagai alternatif pengembangan dan pembangunan ekonomi. Ketergantungan dalam praktik penambangan bukan hal yang alamiah untuk kebutuhan manusia. Pasar bebas

² Wahyudin, Eko A.; Gerakan Sosial Baru dan Politik Lingkungan (Studi Atas Kontribusi WALHI Terhadap Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta 2004-2017; *Repository UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*. Hal. 26

³ Harahap, R. H., & Tarigan, D. M. (2024). Gerakan Sosial Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Struktural Fungsional (Kontribusi Benua Lestari Indonesia di Kota Tangerang). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), Hal. 202

⁴ Herlina, N. (2015). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Hal. 2

dan dominasi ekonomi yang membuat praktik tambang semakin marak dan masif untuk bergerak mengeksploitasi alam di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alamnya.⁵

Konflik mengenai lingkungan hidup yang paling dekat sekarang adalah konflik di wilayah Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. Konflik antara PT. SMN (Sumber Mineral Nusantara) dengan masyarakat lokal Trenggalek tersebut telah berlangsung cukup lama. Pada 2005, PT. SMN telah menerbitkan rencana penambangan emas di Trenggalek. PT. SMN mengantongi izin konsesi dan eksplorasi penambangan seluas 30.000 hektare yang mencakup 9 Kecamatan di Trenggalek. Hal tersebut tak membuat masyarakat Trenggalek tinggal diam. Mereka memulai demonstrasi untuk menolak konsesi lahan yang direncanakan oleh PT. SMN. Mereka membentuk organisasi non-struktural yang dibentuk oleh kumpulan dari berbagai elemen masyarakat yang dinamakan ART (Aliansi Rakyat Trenggalek). Organisasi tersebut berfokus pada gerakan-gerakan sosial masyarakat yang menolak tambang di Trenggalek.

Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) bersama WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Jawa Timur mendesak agar pemerintah Kabupaten Trenggalek memberikan langkah strategis dengan menerbitkan payung hukum untuk perlindungan ruang hidup pada tahun 2021. Namun usulan dari pemerintah Kabupaten Trenggalek itu terhambat oleh keputusan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) tentang kewenangannya mengawal PT. SMN melaksanakan kaidah penambangan dengan baik dan benar. Pada 8 Agustus 2022, Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga kembali mengupayakan permohonan pembatalan IUP (Izin Usaha Penambangan) milik PT. SMN kepada Menteri ESDM. Namun, Pemerintah Pusat seperti tidak mau tahu dan diam dengan permohonan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek.⁶

Bagi masyarakat Trenggalek, alam telah memberikan mereka sumber kehidupan dan juga mata pencaharian mereka. Masyarakat Trenggalek masih banyak yang hidup dari bertani dan berkebun. Jika semua itu lenyap tak tersisa, mereka mungkin akan kesulitan untuk mencari nafkah lagi. Bagi mereka, keberlangsungan ekosistem adalah segalanya. Aktivitas penambangan yang ada, akan menyebabkan mereka kehilangan sumber mata pencaharian mereka. Juga pertimbangan atas kawasan mereka yang berada di pegunungan dan perbukitan menjadi alasan kenapa aktivitas penambangan di sana akan sangat merugikan mereka. Terlebih lagi, beberapa wilayah yang tercantum dalam IUP milik PT. SMN berbatasan langsung dengan

⁵ Wibowo, Prastu heri. (2023). Perlawanan Masyarakat Desa dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. PARADIGMA. 12. 44-57

⁶ Wibowo, Prastu heri. (2023). Perlawanan Masyarakat Desa dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek

wilayah-wilayah yang terdata sebagai wilayah yang rawan akan bencana longsor dan banjir. Maka dengan alasan tersebut, mereka menolak semua usaha penambangan yang akan berlangsung di wilayah mereka. Gerakan sosial menjadi ide penting dalam resistensi masyarakat untuk menolak usaha penambangan di wilayah mereka.

Penelitian ini akan mengkaji 2 aspek utama dari gerakan sosial yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Trenggalek dan juga masyarakat Trenggalek. *Pertama*, penelitian ini akan mengkaji bagaimana gambaran umum wilayah Trenggalek yang berpotensi menjadi wilayah eksploitasi sumber daya alam berupa tambang dan melihat bagaimana latar belakang rencana proyek pertambangan serta melihat bagaimana latar belakang perlawanan masyarakat Trenggalek terhadap tambang melalui Aliansi Rakyat Trenggalek. *Kedua*, penelitian ini akan mencoba melihat ide perlawanan dan bentuk perlawanan dari aksi kolektif yang berjalan pada gerakan sosial menolak tambang di Trenggalek. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan kontribusi terhadap literatur yang ada serta menjadi kajian yang efektif dalam membahas gerakan sosial masyarakat terlebih dalam konflik lingkungan hidup.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran umum dan potensi sumber daya alam yang ada di Trenggalek, dan bagaimana latar belakang proyek tambang dan perlawanan masyarakat Trenggalek terhadap proyek tambang?
2. Bagaimana ide perlawanan dan bentuk perlawanan dan gerakan sosial Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) dalam menolak proyek tambang emas di Trenggalek yang dilihat melalui perspektif teori gerakan sosial Anthony Giddens?

C. Metode

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji bagaimana dinamika organisasi dan mobilisasi pada gerakan sosial masyarakat yang diinisiasi oleh Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) dalam melakukan demonstrasi dan aksi dalam menolak pembangunan tambang emas di wilayah mereka melalui perspektif teori gerakan sosial Anthony Giddens. Berikut adalah alur penerapan metode penelitian ini:

1. Pemilihan Lokasi dan Subjek Penelitian

Peneliti akan memilih beberapa wilayah di Kabupaten Trenggalek terutama yang terdampak dan termasuk dalam rencana konsesi wilayah tambang emas PT. SMN. Subjek yang akan dipilih pada penelitian ini adalah koordinator lapangan/koordinator aksi atau anggota aktif dari Aliansi Rakyat Trenggalek yang aktif dalam memobilisasi gerakan yang ada di masyarakat Trenggalek.

2. Pengumpulan Data

- a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) dilakukan dengan para warga serta anggota dari Aliansi Rakyat Trenggalek (ART). Wawancara akan fokus pada ide-ide kolektif mereka dalam melakukan gerakan sosial dan akan mengulik lebih dalam bagaimana dinamika yang terjadi dalam organisasi serta seberapa luas mobilisasi aksi dilakukan.
- b. Observasi Partisipatif dilakukan oleh peneliti dengan terlibat langsung dalam kegiatan dan aksi Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) untuk mengamati interaksi sosial, bentuk aksi kolektif, dan dinamika internal yang mempengaruhi terorganisirnya gerakan sosial yang mereka jalankan. Observasi ini membantu memahami konteks dinamika internal dalam organisasi mereka dan melihat bagaimana bentuk aksi-aksi kolektif pada gerakan sosial menolak tambang di wilayah mereka.
- c. Dokumentasi dilakukan sebagai cara dalam mengumpulkan dokumen-dokumen terkait. Dokumen yang akan dikumpulkan seperti laporan kegiatan, catatan keterlibatan aksi langsung, serta ideologi dasar masyarakat yang berhubungan dengan penolakan pembangunan tambang dan gerakan sosial.

3. Analisis Data

Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik. Metode ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan topik penelitian dinamika gerakan sosial penolakan terhadap tambang emas di wilayah Trenggalek. Data akan diolah secara bertahap dengan memvalidasi, dan memadukan temuan yang ada di lapangan ke dalam narasi penelitian melalui perspektif dari teori gerakan sosial Anthony Giddens.

4. Validasi Temuan

Peneliti akan menggunakan teknik audit trail dengan menyimpan catatan rinci tentang proses penelitian, termasuk transkrip wawancara dan catatan observasi, sehingga pembaca dapat mengikuti langkah-langkah penelitian dan mengevaluasi keandalan temuan.

D. Prior Riset

Untuk memastikan relevansi dan konteks penelitian, berikut adalah beberapa studi dan riset terdahulu yang memiliki kesamaan dan kesinambungan tema dengan penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Yayum Kumai⁷ mengenai pandangan tentang gerakan sosial menolak tambang bukan hanya berlandaskan masalah ekonomi saja, melainkan gerakan

⁷ Kumai, Y. (2023). Aksi Kewargaan Membela Hak Ekologi Warga Trenggalek: Analisis Ideologis, Lingkungan dan Teologis. *Jurnal HAM*, 14(3),267.

sosial menolak tambang tersebut juga mempunyai unsur ideologi lingkungan, spiritualitas, dan teologis. Dalam penelitiannya, Yayum menjelaskan bahwa penolakan masyarakat terhadap tambang itu bukan karena mereka menolak pembangunan atau menentang negara. Menurutnya, penolakan tersebut juga atas dasar suara-suara demokratis yang sah dilakukan oleh rakyat dalam system demokrasi. Dalam penelitian itu, Yayum lebih menekankan aksi gerakan sosial adalah salah satu bentuk aksi kewargaan yang diambil dari teori Engin Isin dan humanism Islam dari Anna Gade.

Sedangkan Penelitian oleh Eko Aji Wahyudin⁸ mengenai tida isu utama lingkungan hidup di Jakarta yang menjadi wadah atas kontribusi WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Penelitian itu membahas mengenai RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Jakarta. Menurut penelitian tersebut tiga isu lingkungan utama yang terjadi adalah minimnya pelestarian ruang hijau di Jakarta salah satunya RTH. Dalam penelitian ini, didapati temuan bahwa WALHI mempunyai kontribusi penting atas berlangsungnya pembentukan RTH di Jakarta.

Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh Syaribulani dan Muhammad Akhir⁹ membahas tentang gerakan sosial yang ada di Awangpone Kabupaten Bone. Menurut penelitian ini masyarakat Awangpone Kabupaten Bone memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan yang tinggi. Gerakan sosial lingkungan di Awangpone adalah salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan alam mereka. Menurut mereka, kelestarian alam mempengaruhi kesehatan dan kehidupan masyarakat di Awangpone.

Lain dengan Penelitian dan studi yang dilakukan oleh Rahma Hayati dan Devika Meysari¹⁰ tentang gerakan sosial pelestarian lingkungan hidup menurut perspektif fungsional struktural mengenai kontribusi Benua Lestari Indonesia di Kota Tangerang ini mengulas tentang adanya gerakan sosial dan kontribusi masyarakat dalam melestarikan lingkungan serta membangun ekosistem yang berkelanjutan. Dalam hasil penelitiannya, dapat ditemukan bahwa gerakan sosial lingkungan hidup yang dilakukan Benua Lestari Indonesia adalah implementasi dari keseimbangan system antara manusia dengan lingkungan atau alam yang ada di dalam perspektif fungsional structural.

⁸ Wahyudin, Eko A.; Gerakan Sosial Baru dan Politik Lingkungan (Studi Atas Kontribusi WALHI Terhadap Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta 2004-2017; *Repository UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*.

⁹ Abd. Rahman, Syaribulani K., Akhir Muhammad. (2016). Gerakan Sosial Masyarakat Peduli Lingkungan Di Awangpone Kabupaten Bone. *Jurnal Equilibrium*, 175-177

¹⁰ Harahap, R. H., & Tarigan, D. M. (2024). Gerakan Sosial Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Struktural Fungsional (Kontribusi Benua Lestari Indonesia di Kota Tangerang). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2).

Dalam Penelitian oleh Suharko¹¹ yang membahas gerakan sosial baru menjelaskan bahwa gerakan sosial baru dapat dianggap sebagai bentuk gerakan sosial dan paradigm ilmu sosial baru. Dalam penelitiannya ini menganalisis gerakan petani di Indonesia sebagai bagian dari gerakan sosial baru yang ada di Indonesia.

Dalam buku Robert Misesel¹² mencoba mendefinisikan gerakan sosial sebagai sebuah ideologi dan aksi terorganisir yang dilakukan oleh kelompok yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki atau menolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitiannya Misesel menjelaskan bahwa kemunculan gerakan ini tidak bisa terlepas oleh kelompok-kelompok (massa) dan aksi-aksi kolektif. Dalam gerakan sosial menurut Misesel, yang terpenting dari suatu gerakan adalah organisasi. Sebab organisasi adalah mesin penggerak utama dalam sebuah gerakan dan aksi-aksi kolektif.

Dalam riset yang ditulis oleh Idul Akbar¹³, Demokrasi sangat penting dalam bentuk dan jalannya gerakan sosial. Pada penelitian ini Akbar lebih spesifik dalam membahas tentang gerakan sosial yang ada dalam gerakan-gerakan mahasiswa.

Asfianur, Husein, dan Rahmawati dalam penelitiannya¹⁴ membahas terkait gerakan sosial yang melakukan konservasi lingkungan di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Gerakan sosial ini menyuarakan tentang perusahaan yang mengambil sumber daya alam tidak melaksanakan peraturan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan bersama. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa gerakan sosial Sangasanga melawan adalah gerakan sosial yang mempunyai fokus tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang terdampak eksploitasi lingkungan dan hidup di lingkungan hidup yang tidak layak huni. Gerakan sosial yang mereka lakukan hadir dalam empat bentuk, yakni melawan dan menanam, melawan dan membangun, melawan dan mendidik, serta kampanye melalui media massa. Munculnya gerakan sosial ini, membuat masyarakat Kabupaten Kutai bangkit dari kondisi keterpurukan alam mereka yang dulu tidak layak huni.

Berdasarkan semua riset-riset di atas, penelitian tentang lingkungan hidup dan gerakan sosial yang menerapkan aksi serta ide-ide kolektif yang terorganisir oleh kelompok-kelompok

¹¹ Suharko, (2006), Gerakan Sosial Baru di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 10, Nomor 1.

¹² Robert Misesel, Teori Pergerakan Sosial. (Yogyakarta : Resist Book, 2004). Di kutip dari *Jurnal Sebuah Review Teori Gerakan Sosial*. Oleh Gili Argenti.

¹³ Akbar I. (2016). Demokrasi dan Gerakan Sosial (Bagaimana Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial). In *Jurnal Wacana Politik*. (Vol. 1).

¹⁴ Asfianur, S. I. F., Husein, R., Rahmawati D. E. (2022). Analisis Gerakan Sosial “sangasanga melawan” dalam konservasi lingkungan Kecamatan Sangsanga Kabupaten Kutai Kartanegara. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(4), 1014.

masyarakat. Dapat diketahui bahwa setiap gerakan sosial selalu mempunya tujuan untuk merubah atau menolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks lingkungan dan konflik atas tanah masyarakat adat, gerakan sosial mampu menjadi seperangkat ideologi yang dapat melindungi masyarakat dari ancaman kerusakan dan eksploitasi lingkungan hidup yang semakin marak dilakukan.

Perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bagaimana gerakan sosial dapat menggunakan sumber daya yang ada melalui media untuk mengangkat identitas kolektif masyarakat yang terdampak oleh tambang. Bentuk perlawanan melalui kampanye media sosial dengan bentuk film dokumenter dan juga penggunaan slogan “*Tambang Emas Ra Ritek*” ini menjadi media untuk merepresentasikan identitas kolektif masyarakat Trenggalek untuk menolak proyek pertambangan di daerah mereka.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada teori gerakan sosial oleh Anthony Giddens (1984). Teori gerakan sosial Giddens dapat digunakan untuk melihat dan memahami bagaimana konteks sosial dan dinamika dalam gerakan sosial dan aksi-aksi kolektif terutama pada gerakan sosial oleh masyarakat Trenggalek dan Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) terhadap penolakan tambang di Trenggalek. Gerakan Sosial merupakan fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara agen dan struktur sosial. Menurut Anthony Giddens, gerakan sosial dapat dipahami sebagai upaya kolektif untuk mencapai perubahan sosial yang diinginkan. Giddens menekankan bahwa tindakan individu tidak hanya dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk struktur tersebut. Ini menciptakan hubungan dialektis antara agen struktur yang menjadi dasar pemahaman gerakan sosial.¹⁵

a. Pengertian Gerakan Sosial

Gerakan sosial adalah sebuah upaya dalam bentuk kolektifitas untuk mencapai suatu kepentingan bersama. Menurut Anthony Giddens¹⁶ gerakan ini biasanya dilakukan melalui tindakan-tindakan kolektif tanpa terafiliasi oleh lembaga-lembaga konstitusional. Definisi tersebut hampir sama oleh yang dirumuskan oleh Sydney Tarrow¹⁷. Menurutnya, gerakan sosial adalah tantangan-tantangan kolektif yang didasari oleh tujuan-tujuan bersama dalam

¹⁵ Giddens A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. University of California Press.

¹⁶ Suharko, (2006), *Gerakan Sosial Baru di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 10, Nomor 1.

¹⁷ Gili Argenti, (2021). Sebuah Review Teori Gerakan Sosial. *Jurnal Penelitian Bogor Agricultural University* www.repository.ipd.ac.id.

interaksi dengan pemegang kewenangan. Menurutnya suatu gerakan sosial menandakan adanya aksi kolektif perlawanan yang didasari oleh tindakan-tindakan perlawanan secara politis. Tindakan ini biasanya mempunyai bentuk yang bermacam mulai dari aksi spontan yang singkat sampai aksi terorganisir yang berkelanjutan.¹⁸

Gerakan sosial memiliki definisi yang bervariasi dan beragam. Adanya gerakan sosial biasanya diikuti oleh massa yang banyak. Gerakan sosial sangat fleksibel, suatu gerakan sosial dapat berjalan secara organisasi atau struktural maupun non-struktural sebagai gerakan kelompok akar rumput (grassroot).

Tarrow berpendapat, Gerakan sosial bertempat di dalam kategori umum tentang politik perlawanan bersama siklus pertentangan dan juga revolusi. Sebuah gerakan sosial memiliki nuansa perlawanan dan pertentangan ketika aksi tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok atau golongan yang tidak mempunyai akses birokrasi kepada para pemangku kewenangan. Aksi perlawanan menurut Tarrow adalah basis dari gerakan sosial. Sebab, aksi yang dilakukan adalah satu-satunya upaya yang dapat dilakukan oleh massa yang terlibat dalam sebuah gerakan sosial dalam menentang kebijakan atau otoritas yang lebih kuat.

Definisi lain juga dikemukakan oleh Herbert Blumer, yang mengatakan bahwa gerakan sosial mempunyai cara-cara yang tidak terlembagakan atau non-struktural. Dalam praktiknya gerakan sosial dapat berjalan dengan aksi-aksi seperti demonstrasi, pawai, dan protes yang mencakup ide-ide yang mendukung atau menginginkan perubahan sosial. Blumer mengatakan bahwa gerakan sosial dapat memiliki rentang waktu aksi yang cukup panjang. Gerakan sosial yang dikatakan Blumer bukan hanya sebuah aksi untuk menuntut perubahan, melainkan juga sebuah transformasi kesadaran manusia untuk mencapai ide-ide yang mereka inginkan. Gerakan sosial adalah suatu gerakan yang identik pada totalitas massa dalam mengawal gerakan. Jadi, gerakan sosial sangat dipengaruhi oleh seberapa keras usaha kelompok atau golongan yang melakukannya. Menurut Blumer gerakan sosial cenderung dilakukan secara kompak oleh masyarakat dan juga selalu berdampingan dengan harapan dan semangat mereka untuk berkorban demi mencapai ide-ide yang diperjuangkan oleh kelompok atau golongan.¹⁹

b. Akar Gerakan Sosial

Akar dari gerakan sosial merujuk pada faktor-faktor yang membentuk sebuah gerakan sosial, seperti ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik, atau budaya, serta keinginan untuk mendorong perubahan. Akar gerakan sosial dapat dibagi dalam beberapa

¹⁸ Gili Argenti, (2021). Sebuah Review Teori Gerakan Sosial.

¹⁹ Gili Argenti, (2021). Sebuah Review Teori Gerakan Sosial

elemen utama, seperti ketimpangan sosial, deprivasi relatif, identitas kolektif, dan mobilisasi sumber daya. Berikut penjelasan terkait beberapa elemen utama yang menjadi akar gerakan sosial:

a) Ketimpangan Sosial dan Ketidakadilan

Ketimpangan sosial, seperti halnya kesenjangan ekonomi, diskriminasi, dan marginalisasi kelompok tertentu sering menjadi faktor yang mendorong munculnya gerakan sosial.²⁰

b) Deprivasi Relatif

Dalam teori deprivasi relatif menyatakan bahwa gerakan sosial muncul ketika individu atau kelompok kehilangan hak dibanding kelompok yang lain, meskipun dalam keadaan yang mapan.²¹

c) Identitas Kolektif

Identitas kolektif sering kali dapat mendorong terbentuknya gerakan sosial di mana individu bersama membentuk kelompok berdasarkan nilai, budaya, tujuan, dan ideologi yang mereka bangun.²²

d) Mobilisasi Sumber Daya

Mobilisasi sumber daya menjadi salah faktor penting yang menjadi akar dari gerakan sosial. Sebuah gerakan sosial membutuhkan sumber daya demi keberhasilan langkah mereka dalam melakukan gerakan. Sumber daya yang dibutuhkan seperti jaringan sosial, media, atau dukungan komunitas.²³

e) Krisis Politik atau Sosial

Krisis dalam dunia politik seperti korupsi, oligarki, otoritarianisme, atau bencana alam dapat memunculkan faktor terbentuknya gerakan sosial. Gerakan sosial muncul dalam merespon krisis politik sebagai jalan yang menuntut perubahan dalam ranah politik dan sosial.²⁴

²⁰ Hartoyo, A. (2011). "Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani". *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1-15

²¹ Rusmanto, J. (2012). "Teori Gerakan Sosial: Sejarah Perkembangan Teori Antara Kekuatan dan Kelemahannya". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.

²² Maryani, E., & Adiprasetyo, J. (2018). "Literasi.co sebagai Media Alternatif dan Kooperasi Akar Rumput". *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 261-267.

²³ Sari, D. K., & Siahainenia, R. R. (2019). "Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah". *Jurnal Komunikasi Indonesia*.

²⁴ Cahyono, A. S. (2015). "Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia". *Publiciana*, 8(1).

Dalam teori gerakan sosial yang dikemukakan Alan Touraine, mengatakan bahwa gerakan sosial muncul dari ide dan tindakan yang bertujuan mengubah struktur sosial. Hal ini relevan pada pembahasan faktor-faktor yang menjadi akar dari sebuah gerakan sosial.²⁵

c. Pelaku Gerakan Sosial

Dalam sebuah gerakan sosial, pelaku gerakan sosial merupakan hal yang penting untuk berjalannya sebuah gerakan sosial. Pelaku gerakan sosial mempunyai definisi sebagai organisasi, kelompok, atau individu yang terlibat aksi kolektif dalam membantu mendorong perubahan baik secara sosial, politik, maupun budaya. Jenis pelaku meliputi individu seperti aktivis, pemimpin atau tokoh masyarakat, organisasi atau serikat pekerja, serta kelompok pendukung seperti media atau relawan.²⁶ Aktor atau pelaku gerakan sosial tidak hanya diisi oleh individu atau masyarakat kelas bawah, tetapi kelas menengah juga dapat hadir menjadi pelaku gerakan sosial. Tentunya, pelaku dalam sebuah gerakan sosial berfungsi sebagai penggerak, pendukung atau penentang tergantung pada konteks atau ide yang mendorong mereka untuk melakukan perubahan.

Pelaku gerakan sosial berperan mencakup mobilisasi sumber daya, pemetaan isu, dan perencanaan serta pelaksanaan strategi aksi. Pelaku mengelola sumber daya seperti dana, jaringan, atau media untuk menyokong gerakan, contohnya dalam Gerakan Gejayan Memanggil 2019 di Yogyakarta.²⁷ Pelaku gerakan sosial juga melakukan pemetaan isu dengan melihat aspek ketidakadilan untuk memperoleh dukungan publik. Mereka juga merancang strategi dan merencanakan aksi seperti demonstrasi, diskusi mengenai isu, advokasi, dan kampanye digital dengan pihak pemangku kebijakan untuk dapat mencapai tujuan dari gerakan mereka.

Faktor yang memengaruhi aktor meliputi identitas kolektif, peluang politik, dan jaringan sosial. Identitas kolektif bisa dalam bentuk profesi, ideologi, maupun nilai-nilai yang ada di masyarakat. Seperti yang ada dalam gerakan mahasiswa atau dalam gerakan May Day oleh buruh, ideologi dan nilai-nilai menjadi hal yang penting untuk disampaikan.²⁸ Kebijakan pemerintah atau krisis sosial-politik juga dapat menjadi faktor penting yang memengaruhi pelaku gerakan sosial untuk melakukan tindakan. Media dan jaringan sosial juga sangat berpengaruh dalam mobilisasi sebuah gerakan sosial.

²⁵ Rusmanto, J. (2012). "Teori Gerakan Sosial: Sejarah Perkembangan Teori Antara Kekuatan dan Kelemahannya". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.

²⁶ Haryanto, (2013) "PKBI: Aktor Intermediary dan Gerakan Sosial Baru", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 16, no. 3:187-199.

²⁷ Nofrima, S. (2021). "Gerakan Sosial Baru Indonesia: Studi Gerakan Gejayan Memanggil 2019", *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 1: 187-207.

²⁸ Nofrima, S. (2021). "Gerakan Sosial Baru Indonesia

d. Bentuk-bentuk Gerakan Sosial

Gerakan sosial adalah bentuk upaya kolektif untuk mencapai perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya, dengan berbagai macam bentuk tergantung pada konteks, tujuan, dan strateginya. Berikut adalah bentuk-bentuk dari gerakan sosial yang ada :

1. Gerakan Reformasi

Gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaiki sistem tanpa mengganti struktur keseluruhan dari sistem yang sudah ada terdahulu. Gerakan Arab Spring menjadi satu contoh dari gerakan reformasi, di mana demonstrasi massal menuntut reformasi terhadap sistem yang dianggap buruk karena mengakibatkan pengangguran dan pelanggaran HAM.²⁹

2. Gerakan Revolusioner

Gerakan revolusioner adalah bentuk gerakan yang paling radikal diantara yang lain. Gerakan ini berupaya menjatuhkan sistem secara keseluruhan, yang biasanya disebabkan oleh konflik langsung. Gerakan revolusioner yang terjadi di Indonesia contohnya seperti gerakan petani yang menentang kebijakan agrarian yang merugikan. Gerakan petani dapat dikatakan sebagai gerakan revolusioner karena tujuan gerakan tersebut ialah merubah keseluruhan struktur sistem pemangku kebijakan.³⁰

3. Gerakan Perlawanan

Gerakan ini bersifat defensif yang muncul sebagai respons terhadap kebijakan yang merugikan, seperti pembangunan infrastruktur dan pembebasan lahan. Sebagai contoh, gerakan perlawanan oleh Forum Penyelamat Rakyat (FPR) yang menentang kebijakan proyek strategis nasional pembangunan Bandara Kediri yang mengancam aset budaya masyarakat yang terdampak dalam wilayah tersebut.³¹ Gerakan perlawanan bersifat lokal dan melibatkan komunitas atau kelompok yang terdampak langsung dengan kebijakan.

4. Gerakan Berbasis Media Sosial

Gerakan yang berbasis media sosial biasanya memanfaatkan platform digital untuk mencari dukungan serta melakukan mobilisasi aksi. Contohnya, gerakan #2019GantiPresiden di Indonesia yang muncul sebagai respons atas kondisi demokrasi

²⁹ Departemen Ilmu Hubungan Internasional, 2019. "Gerakan Sosial Global", *Jurnal Hubungan Internasional*, Universitas Gadjah Mada, hlm. 3.

³⁰ *Jurnal Sosiologi*, 2020. "Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani", Universitas Gadjah Mada, hlm. 15.

³¹ Faisol Aufa, 2023. "Gerakan Perlawanan Masyarakat Terhadap Pembangunan Bandara Kediri", *Skripsi*, IAIN Kediri, hlm. 45.

yang sedang terjadi, kemudian disusul dengan gerakan politik formal.³² Gerakan ini menunjukkan kekuatan media sosial dalam mempercepat penyebaran ide dan isu yang menjadi tujuan utama gerakan tersebut muncul.

e. Sejarah Gerakan Sosial Lingkungan dan Perlawanan terhadap Tambang Di Indonesia

Gerakan sosial lingkungan di Indonesia mulai hadir sekitar tahun 1970-an sebagai respons terhadap maraknya eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh industri pertambangan. Di Kalimantan dan Papua aktivitas pertambangan memicu perlawanan dari masyarakat adat yang merasa terancam oleh eksploitasi alam dan pelanggaran hak atas tanah adat mereka. Bersamaan dengan terancamnya kelestarian lingkungan tersebut WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) hadir sebagai pelopor gerakan lingkungan dengan mendukung komunitas dan masyarakat adat yang terdampak. Pada awalnya gerakan ini masih bersifat lokal dan terbatas, tetapi gerakan ini berhasil meletakkan dasar bagi advokasi lingkungan yang lebih terorganisir di Indonesia yang berfokus pada perlindungan ekosistem dan keadilan sosial.³³

Pada masa Orde Baru, perlawanan terhadap tambang seperti tambang tembaga dan tambang emas seperti PT Freeport di Papua, menjadi simbol ketegangan masyarakat adat dengan kepentingan ekonomi nasional. Suku Amungne dan Kamoro menjadi salah satu contoh masyarakat adat yang melakukan protes atas penggusuran tanah adat dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan. Namun, pada rezim otoriter Soeharto seperti menekan gerakan lingkungan ini untuk melindungi industri atau investor asing. Represifitas yang terjadi itu membuat masyarakat lokal mulai menggunakan strategi seperti petisi dan negosiasi untuk menuntut kompensasi dan perlindungan lingkungan.³⁴

Pasca era Reformasi 1998, gerakan sosial lingkungan mulai mendapatkan kesempatan yang ditandai dengan munculnya perlawanan terhadap proyek-proyek tambang yang eksploitatif. Contohnya, perlawanan masyarakat Teluk Buyat, Sulawesi Utara melawan PT Newmont Minahasa Raya yang dianggap melakukan pencemaran pada teluk yang diakibatkan oleh limbah pertambangan. Masyarakat memulainya dengan perorganisasian demonstrasi dan pengajuan gugatan hukum untuk menghentikan aktivitas pertambangan. Seiring dengan

³² *Jurnal Ilmu Sosial*, 2020. “Analisis Gerakan Sosial #2019GantiPresiden”, Universitas Negeri Semarang, hlm. 23.

³³ Santosa, M. A. (2015). “Peran WALHI dalam Gerakan Lingkungan di Indonesia: Studi Awal 1980-an”. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 3(1), 25

³⁴ Widjaja, T. (2017). “Konflik Tambang Freeport dan Perlawanan Masyarakat Adat di Papua”. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 38(2), 89

kebebasan berekspresi yang meningkat pasca era Reformasi, memungkinkan gerakan ini dapat memanfaatkan media dalam memperluas jangkauan dan mendapatkan dukungan publik.³⁵

Walaupun gerakan sosial lingkungan di Indonesia telah mencatatkan keberhasilan, tantangan yang dihadapi masih cukup signifikan. Konflik antara pemerintah dan korporasi dengan masyarakat lokal sering kali menggunakan ancaman-ancaman kriminalisasi aktivis. Hal ini tentunya menjadi hambatan tersendiri bagi aksi-aksi perlawanan masyarakat. Tetapi, kolaborasi antara komunitas, NGO, dan masyarakat serta pemanfaatan teknologi dan media menciptakan harapan baru bagi perjuangan. Menurut studi, keberhasilan suatu gerakan tergantung pada solidaritas antar sektor dan strategi advokasi yang inklusif.³⁶

Giddens mengidentifikasi dua elemen utama dalam gerakan sosial: niat kolektif dan kesadaran kolektif. Niat kolektif mencakup tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok, sementara kesadaran kolektif melibatkan pemahaman dan nilai-nilai bersama di antara anggota kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan sosial bukan hanya respons terhadap kondisi sosial, tetapi juga mewakili keinginan dan aspirasi bersama dari individu yang terlibat. Dalam konteks Indonesia, banyak gerakan sosial yang muncul dengan latar belakang nilai-nilai budaya yang kuat, menciptakan identitas kolektif yang khas.³⁷

Giddens juga menekankan pentingnya konteks sosial dalam memengaruhi gerakan sosial. Dia berargumen bahwa setiap gerakan sosial muncul dalam kerangka sejarah dan budaya tertentu yang memberikan makna dan nilai bagi aksi kolektif. Misalnya, gerakan sosial reformasi di Indonesia tahun 1998 yang dipengaruhi oleh sejarah panjang otoritarianisme dan keinginan untuk demokrasi. Dalam hal ini, konteks sosial bukan hanya latar belakang, tetapi juga bagian integral dari pemahaman tentang bagaimana dan mengapa gerakan sosial berkembang.³⁸

Akhirnya, kerangka teoritis Giddens mengenai gerakan sosial memberikan wawasan yang mendalam tentang hubungan antar individu, sosial, dan konteks budaya. Dengan memahami gerakan sosial sebagai hasil dari interaksi kompleks antara agen dan struktur, kita dapat lebih baik dalam menganalisis dinamika sosial yang terjadi.³⁹ Teori ini cukup relevan

³⁵ Hidayat, R. (2019). "Gerakan Sosial Lingkungan di Teluk Buyat: Perlawanan Terhadap PT Newmont". *Jurnal Sosiologi Lingkungan*, 5(1). 33

³⁶ Susanti, E. (2021). "Tantangan dan Peluang Gerakan Sosial Lingkungan di Indonesia: Perspektif Advokasi". *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 10(3) 45.

³⁷ Sari D. (2019). Gerakan Sosial di Indonesia: Perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 12(1), hal. 45-60.

³⁸ Putra A. (2020). Peran Media dalam Mobilisasi Gerakan Sosial di Era Digital. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 5(2), 123-138

³⁹ Putra A. (2020). Peran Media dalam Mobilisasi Gerakan Sosial

untuk memahami dinamika yang terjadi pada gerakan sosial dalam konteks penolakan terhadap tambang yang ada di Trenggalek.